**PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB
ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)

Violita Salsabila Azhaary¹, Muhamad Abas², Yuniar Rahmatiar³

**Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan
Karawang**

¹HK18.violitaazhaary@mhs.ubpkarawang.ac.id

²Muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

³Yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Administrasi Kependudukan adalah bagian sistem dari administrasi negara, memiliki peranan penting dalam pemerintah dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara serta ketentuan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi ditinjau dari Hukum Administrasi Negara dan ketentuan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau penerapan ketentuan hukum normatif untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dari Penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan KTP-el belum dilaksanakan secara optimal, seperti bagaimana mestinya masyarakat yang seharusnya ditargetkan memiliki KTP-el sebagai kelengkapan data diri masing-masing. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kata kunci : Pendaftaran Penduduk, Tertib Administrasi KTP-el, Hukum Administrasi Negara

ABSTRACT

Population Administration is part of the system of state administration, has an important role in government and development of population administration. The problem raised in this study is how to apply population registration as an effort to orderly administration in terms of State Administrative Law and the provisions for the implementation of Population Administration services. The purpose of this study was to determine the application of population registration as an effort to orderly administration in terms of State Administrative Law and the provisions of the

implementation of population administration services in Karawang Regency. In this study, the author uses the Juridical Empirical Approach Method. Empirical juridical research is legal research regarding the enforcement or application of normative legal provisions to determine the legal norms contained in statutory regulations. The results of the author's hypothesis are showing that the implementation of the electronic ktp has not been implemented optimally, such as how the targeted community should have an elektronik ktp as a complete set of personal data. As explained in the provisions of the Karawang Regency Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning the Implementation of Population Administration.

Keywords: Resident Registration, Orderly Administration of Electronic KTP, State Administrative Law

PENDAHULUAN

Populasi yang meningkat pesat memiliki dampak signifikan terhadap berbagai masalah lingkungan dan aspek lainnya. Munculnya tantangan-tantangan ini sering kali dipicu oleh ketimpangan dalam persebaran penduduk, yang membutuhkan tindakan segera dari pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai. Dalam menghadapi masalah ini, penting untuk melakukan perencanaan yang teliti dalam merumuskan kebijakan terkait pertumbuhan populasi masyarakat.¹

Untuk mencapai tertib administrasi kependudukan yang efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, pemerintah harus menyusun dan menerapkan kebijakan

yang fokus pada pendataan dan pendaftaran penduduk secara akurat, lengkap, dan terpadu dengan dukungan teknologi informasi yang canggih. Kedua, penting untuk melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki KTP sebagai bukti identitas yang sah dan akses ke layanan publik yang lebih baik melalui kampanye publik melalui berbagai saluran komunikasi. Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas administrasi kependudukan di lembaga terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, perlu dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu membangun dan memelihara infrastruktur yang mendukung

¹ Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi E-KTP Isu Kebijakan Administrasi Kependudukan*,

Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm 8.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

pelayanan administrasi kependudukan, termasuk pusat data kependudukan yang terintegrasi, jaringan komunikasi yang handal, dan ketersediaan blangko KTP yang memadai. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah dapat mencapai tertib administrasi kependudukan yang berdampak positif, seperti perumusan kebijakan yang tepat, perencanaan pembangunan yang akurat, penyelenggaraan pemilu yang efisien, verifikasi identitas yang mudah, dan penerbitan dokumen kependudukan yang lancar. Selain itu, pemegang KTP yang sah akan lebih mudah mengakses layanan publik dan memperoleh hak-hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“Dokumen Kependudukan meliputi: a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil.”

Administrasi Kependudukan memiliki peran penting dalam pemerintahan dan pembangunan, serta

bertujuan untuk memenuhi hak asasi setiap individu dalam bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi. Pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan merupakan bagian integral dari Administrasi Kependudukan.

“Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi kependudukan. Mereka memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada penduduk terkait pelaporan peristiwa kependudukan penting seperti kelahiran, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perceraian, kematian, dan lain-lain. Pentingnya melakukan pendataan secara menyeluruh, terutama dalam hal kelahiran dan kematian, menjadi bagian

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

integral dalam administrasi kependudukan.²

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Pendaftaran kependudukan memiliki manfaat penting dalam berbagai aspek seperti perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemilu, verifikasi identitas penduduk, dan penerbitan dokumen kependudukan.³ Tanggung jawab pengelolaan pendaftaran penduduk ada pada pemerintah kota/kabupaten. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi dasar hukum yang memberikan mandat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk pada tahun 2015. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 juga berperan penting dalam penerapan

kebijakan ini, dengan mengatur tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 mengatur bahwa pendaftaran penduduk mencakup pencatatan biodata, pelaporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik

“bahwa pelayanan publik adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Bagi pemohon KTP-el pemula, mereka harus secara langsung datang ke Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

² Uli E. S., *Efektivitas Pengawasan bagi Pendataan Penduduk Non Permanen*, *Jurnal Hukum*, Surabaya, 2017.

³ Abdullah R., *“Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,”* *Jurnal Publik*.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

(Disdukcapil) setempat untuk rekam data dan foto, tanpa diwakilkan.

Masalah dalam penerapan KTP-el di daerah terpencil adalah biaya transport yang tinggi untuk pembuatan biometrik dan foto digital.⁴ Proyek pembuatan KTP-el bernilai triliunan rupiah di Indonesia telah menghadapi kendala dalam sistem administrasi akibat dugaan korupsi, kurangnya blangko, alat pencetakan, dan gangguan jaringan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang mengalami kendala serius dalam efisiensi pelayanan publik untuk merekam KTP-el bagi sekitar 1.774.505 jiwa penduduk di Kabupaten Karawang.⁵ Dalam upaya meningkatkan kecakapan administrasi kependudukan, Disdukcapil Karawang menargetkan pembuatan KTP Elektronik untuk warga rentan seperti disabilitas, lansia, cacat mental, dan mereka yang mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan. Pendataan dilakukan secara langsung di lapangan oleh personil Disdukcapil untuk membantu perekaman KTP bagi kelompok masyarakat tersebut, serta

pendataan warga rentan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Karawang dengan mobilitas penduduk yang tinggi.

Dalam penerapan KTP-el di Kabupaten Karawang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengalami kekurangan blangko KTP-el yang menyebabkan puluhan ribu masyarakat belum memiliki KTP-el. Meskipun terdapat kendala dalam program KTP-el, seperti jumlah blangko yang tidak mencukupi dan keterbatasan alat cetak, namun penerapan KTP-el telah efektif dalam merapikan administrasi kependudukan di Karawang. Melalui perekaman KTP-el yang terintegrasi, jumlah penduduk Kabupaten Karawang mengalami penurunan pada tahun 2019 dan ditemukan adanya kasus KTP ganda melalui program KTP-el tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang akan diangkat yakni; Bagaimana penerapan pendaftaran penduduk sebagai upaya tertib administrasi (khususnya pembuatan

⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi e-KTP Isu Kebijakan Administrasi Kependudukan*, Rineka, Bandung, 2017, hlm 38.

⁵ Maskup U, *Tujuan dan Manfaat Administrasi Kependudukan*, Dinas Kependudukan DKI Jakarta, Jakarta, 198, hlm 32.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

KTP-el) ditinjau dari Hukum Administrasi Negara di Kabupaten Karawang; Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketentuan pelaksanaan pelayanan KTP-el Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karawang.

METODE

Metode ini melibatkan penelitian lapangan (Yuridis Empiris) dengan menggabungkan data hukum dan perilaku masyarakat. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan melibatkan responden sebagai sumber informasi utama. Penelitian ini memiliki spesifikasi Deskriptif Eksplanatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis terhadap kaedah-kaedah hukum dalam konteks kasus konkret.⁶

Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan. Tahapan persiapan meliputi menentukan masalah penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dan melakukan studi kepustakaan. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber kepustakaan

dan penelitian lapangan. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah untuk melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum guna mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang diteliti. Tahap pembahasan melibatkan penyajian hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan menyimpulkan temuan penelitian.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu dengan bahan-bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23

⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm, 57.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

5) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu mengenai bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar-pakar hukum yang memiliki relevansi dan korelasi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis;

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu mengenai bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Pendaftaran Penduduk Sebagai Upaya Tertib Administrasi Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara di Kabupaten Karawang

Indonesia, dengan populasi sekitar 245 juta, memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini memberikan hak-hak kepada penduduk, termasuk hak atas dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi pendaftaran kependudukan, serta hak ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam kasus kesalahan pendaftaran dan penyalahgunaan data pribadi.

“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Pada prinsipnya, KTP-el diberikan kepada individu yang berusia 17 tahun atau lebih atau yang telah menikah, sebagai alat untuk mengesahkan identitas bagi penduduk dewasa. KTP-el merupakan kartu resmi sebagai bukti identitas bagi setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. menerbitkan Dokumen Kependudukan; d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Dalam proses verifikasi KTP, digunakan blanko kertas dan lapisan plastik untuk melaminasi, serta penambahan stempel resmi sebagai

bukti otentikasi. Verifikasi dilakukan oleh tingkat terendah yaitu RT/RW. KTP elektronik memiliki perubahan seperti pencetakan foto langsung pada kartu, bahan plastik, pengawasan dan verifikasi oleh RT/RW, tanda tangan/cap jempol pemilik, dan nomor serial khusus. KTP elektronik muncul sebagai solusi terhadap masalah duplikasi KTP pada sistem konvensional. Pemerintah berupaya mengakhiri penggunaan KTP Non Elektronik, namun keberlakuan KTP Non Elektronik diperpanjang beberapa kali hingga tanggal 31 Desember 2014 melalui peraturan presiden yang dikeluarkan.

Pemerintah meluncurkan program KTP elektronik (KTP-el) pada tahun 2011 untuk menggantikan KTP kertas di Indonesia. KTP-el berfungsi sebagai identitas pribadi dengan fitur keamanan berupa kode dan rekaman elektronik.⁷ Program ini bertujuan untuk menyediakan data administrasi kependudukan yang akurat dengan menggunakan NIK Nasional dan fitur biometrik seperti sidik jari. KTP-el mencegah pemalsuan dan duplikasi, serta mendukung berbagai kegiatan

⁷ Hery S, *Matlab Untuk Pemrosesan Citra Digital*, Rineka, Bandung, 2000, hlm 21.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

seperti akses kesehatan, pendidikan, pemilihan umum, bisnis, dan perbankan. Penggunaan biometrik pada KTP-el memastikan keaslian pemilik dan mencegah penggandaan, dengan rekaman sidik jari disimpan dalam sistem pusat data di Jakarta.

“Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.”

KTP-el menyimpan informasi nama, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status pekerjaan, kewarganegaraan, berlaku hingga, foto, tanda tangan, dan NIK. Strukturnya memiliki sembilan lapisan dengan *chip* yang tertanam di antara plastik. Pembuatannya melibatkan

berbagai tahap seperti *hole punching*, penempatan *chip*, pemasangan antena, pencetakan kartu, dan penutupan dengan plastik pelindung. KTP-el dilengkapi dengan keamanan pencetakan seperti relief *text*, *microtext*, *invisible ink*, dan desain anti-copy. Meskipun gratis, pemegang KTP-el memerlukan rekomendasi dari instansi pemerintah untuk keabsahan dalam transaksi karena tidak ada tampilan tanda tangan di permukaannya. Proses pembuatannya mirip KTP konvensional, tetapi melibatkan pengambilan sidik jari dan pemindaian retina. Setelah selesai, KTP-el dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

“KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir; laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.”

“Yang dimaksud dengan ”dokumen Pendaftaran Penduduk” adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.”

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Edaran menetapkan bahwa KTP-el berlaku seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Kabupaten Karawang menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan membentuk Kelompok Kerja Desk KTP-el. Penerapan pelayanan publik untuk pembuatan KTP-el di Kabupaten Karawang berjalan lancar berkat kesadaran masyarakat, peralatan yang memadai, ketersediaan blangko yang cukup, SDM yang berkualitas, dan pelaksanaan program KTP-el secara bersamaan. Namun, beberapa hambatan masih ada, seperti masalah jaringan, keterlambatan blangko KTP, kerusakan alat, kelengkapan berkas, dan kesalahan data dari pemohon/masyarakat.⁸

Pada tahun 2018, penerapan kewajiban memiliki KTP-el bagi Warga Negara Republik Indonesia masih belum terpenuhi dengan capaian nasional perekaman KTP elektronik

baru mencapai 86%.⁹ Pemerintah telah mengeluarkan instruksi pada tahun 2016 yang mewajibkan setiap warga negara memiliki KTP-el dan menyederhanakan prosedur pelayanan. Upaya percepatan program KTP-el dilakukan melalui pembukaan loket khusus, pelayanan rekam cetak di luar domisili, dan pelayanan keliling di berbagai tempat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Karawang telah mengimplementasikan strategi pelayanan yang optimal, termasuk pemanggilan warga melalui surat panggilan dan perekaman e-mobile di sekolah dan rumah warga.¹⁰

“Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 12.34 WIB.

⁹ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 471/1768/SJ Hal

Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran tertanggal 12 Mei 2016

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 15.00 WIB.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.”

Pelayanan pembuatan KTP-el di Kabupaten Karawang terbatas karena ketersediaan terbatas alat perekam dan cetak, serta sumber daya manusia. Upaya dilakukan untuk memperbaiki perangkat yang rusak. Komitmen pegawai dan Mall Pelayanan Publik mendukung optimalisasi pelayanan dengan hari kerja tambahan. Meskipun terbatas, pelayanan KTP-el dianggap cukup dengan rata-rata 40 warga per hari. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bertujuan memberikan NIK kepada setiap penduduk dan memenuhi hak-hak mereka dalam administrasi kependudukan.

Hukum Administrasi Negara, juga dikenal sebagai Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Pemerintahan, mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, serta tugas dan fungsi alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara melindungi warga negara dari tindakan administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri.¹¹ Penerapan KTP-el oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam pendaftaran penduduk sesuai dengan Hukum Administrasi Negara.¹² KTP-el menjadi langkah awal untuk menerapkan Single Identify Number (SIN) yang menggunakan NIK seumur hidup untuk penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketentuan Pelayanan KTP-el Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karawang

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dan

¹¹ M. Sadi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 34.

¹² Bachsan Mustafa, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bkati, Bandung, 2001, hlm 6.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

penghambat pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, khususnya pembuatan KTP-el, di Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dikaitkan dengan kendala dalam pelaksanaan tertib administrasi secara luas di Indonesia serta faktor-faktor internal yang memengaruhi kinerja pelayanan publik di tingkat daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki KTP-el, kurangnya fasilitas yang memadai seperti infrastruktur teknologi dan jaringan yang stabil, keterlambatan dalam ketersediaan blangko KTP-el, kerusakan atau keterbatasan alat pendukung KTP-el, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Semua faktor ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Pemerintah Kabupaten Karawang. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, langkah-langkah perlu diambil seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya KTP-el,

meningkatkan investasi dalam infrastruktur dan teknologi, memperbaiki pengadaan dan distribusi blangko KTP-el, melakukan perawatan dan perbaikan rutin terhadap alat pendukung KTP-el, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan dan prosedur administrasi kependudukan¹³.

Penerapan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang didasarkan pada produk hukum yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan berbagai peraturan terkait. Lembaga/instansi yang terlibat adalah Pemerintah Kabupaten Karawang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Mall Pelayanan Publik. Namun, faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, fasilitas yang kurang memadai, ketidakstabilan jaringan, dan kerusakan alat pendukung KTP-el mempengaruhi penerapan dan menjadi penghambat. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan sosialisasi, memperbaiki fasilitas dan jaringan, serta memperbaiki alat

¹³ Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Jakarta, 2012, hlm 46.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

pendukung agar pelayanan publik dapat optimal.

“Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi: a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. sosialisasi Administrasi Kependudukan; d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.”

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, didukung oleh PNS dan MPP, telah mengoptimalkan pelayanan pembuatan KTP-el dengan dukungan Pemerintah Pusat. Upaya percepatan program KTP-el dilakukan melalui loket khusus, pelayanan di luar domisili, dan pelayanan keliling. Langkah-langkah tambahan termasuk pemanggilan warga, perekaman e-mobile, dan kegiatan sosialisasi. Komitmen lembaga/instansi tersebut memastikan kelancaran

pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang. Penegakan hukum terkait penerapan kebijakan administrasi kependudukan dan kepemilikan KTP-el dilakukan melalui instruksi Kementerian Dalam Negeri. Instruksi tersebut mewajibkan setiap warga memiliki KTP-el paling lambat akhir 2020. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ menyederhanakan prosedur perekaman KTP-el dengan menghilangkan persyaratan surat pengantar dari RT/RW. Cukup dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, warga dapat memperoleh KTP-el.

“Kendala dalam penerapan Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan (pembuatan KTP-el) di Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, fasilitas yang kurang memadai seperti mesin pencetak dan keterlambatan pengadaan blangko KTP-el, tidak stabilnya jaringan yang mengganggu penyimpanan data, dan alat pendukung KTP-el yang rusak dan tidak dapat ditukar dengan Pemerintah Pusat. Kendala-kendala ini menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dalam bidang administrasi kependudukan.” (Ibu Susi

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Susilawati dalam wawancara dengan penulis)

“Kendala dalam penerapan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karawang adalah kurangnya kesadaran dan antusiasme masyarakat dalam mendaftar dan memperoleh KTP-el. Belum semua penduduk Kabupaten Karawang memiliki KTP-el.” (Ibu Susi Susilawati dalam wawancara dengan penulis)

Pada tanggal 30 September 2020, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa tidak akan diberlakukan sanksi kepada warga yang belum membuat KTP-el. Alasannya adalah karena KTP-el merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat sepanjang hidup mereka. Hal ini dikarenakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam KTP-el dibutuhkan untuk mengakses berbagai pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melihat pentingnya memberikan kesempatan dan dukungan kepada masyarakat untuk memperoleh KTP-el tanpa harus dikenakan sanksi.

“Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti

diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Terjadi berbagai dinamika dalam penerapan dan penghambatan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, khususnya dalam pembuatan KTP-el di Pemerintah Kabupaten Karawang. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh implementasi amanat perundang-undangan yang berlaku di Pemerintah Republik Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan KTP-el di Kabupaten Karawang berjalan lancar berkat dasar hukum yang ada, dukungan Pemerintah Pusat, komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta program nasional KTP-el.

Penerapan pelayanan publik administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang lancar berkat dasar hukum yang ada, dukungan Pemerintah Pusat, komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Kabupaten Karawang, SDM yang berkualitas, dan program nasional KTP-el. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya sosialisasi, fasilitas yang kurang memadai, keterlambatan blangko, jaringan yang tidak stabil, kerusakan alat pendukung KTP-el, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah R., “*Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,*” *Jurnal Publik.*

Abdullah R., *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,* FH Press, Universitas Garut, Garut, 2017.

Bachsan Mustafa, *Sistem Administrasi Negara Indonesia,* Citra Aditya Bkati, Bandung, 2001.

Hery S, *Matlab Untuk Pemrosesan Citra Digital,* Rineka, Bandung, 2000.

M. Sadi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara,* Kencana, Jakarta, 2021.

Maskup U, *Tujuan dan Manfaat Administrasi Kependudukan,* Dinas Kependudukan DKI Jakarta, Jakarta, 1908.

Sahya Anggara, *Perbandingan Administrasi Negara,* Pustaka Setia, Jakarta, 2012.

Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi E-KTP Isu Kebijakan Administrasi Kependudukan,* Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Wahyudi Kumorotomo, *Implementasi e-KTP Isu Kebijakan Administrasi Kependudukan,* Rineka, Bandung, 2017

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas.

PENERAPAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KTP-EL DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG) *Violita Salsabila Azhaary, Muhamad Abas, Yuniar Rahmatiar*

Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102
Tahun 2012.

Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 14 Tahun
2021.

C. SUMBER LAINNYA

Uli E. S., *Efektivitas Pengawasan bagi Pendataan Penduduk Non Permanen*, *Jurnal Hukum*, Surabaya, 2017.